

## Bab 4

### PELAKSANAAN SIDI DI DAERAH PEMANDUAN LOMBOK TENGAH DAN BOYOLALI

Daftar penulis naskah untuk Bab 4 :

1. Mashari Sudjono
2. Avianti Zulaicha
3. Iman Sumarno
4. Djumadias Abunain
5. Parwoto W.P.
6. Sri Prihatini

# 4

## PELAKSANAAN SIDI DI DAERAH PEMANDUAN LOMBOK TENGAH DAN BOYOLALI

Pada akhir Bab I diuraikan dalam garis besar fase-fase kegiatan pengembangan SKPG. Uraian dalam Bab IV ini lebih ditekankan pada pengalaman Puslitbang Gizi di dalam mengembangkan SKPG di dua daerah pemanduan yaitu Lombok Tengah dan Boyolali.

### Pendekatan Pelaksanaan SIDI

Mula-mula Puslitbang Gizi bekerjasama dengan Universitas Cornell dan Direktorat Gizi melakukan serangkaian penelitian untuk merumuskan SIDI. Hasilnya didiskusikan dengan Pemda beserta aparatnya di dalam suatu pertemuan. Hal-hal yang didiskusikan antara lain : (1) sistem dan komponen-komponennya, (2) kelayakan pelaksanaan, (3) pemantapan sarana pelaksanaan SIDI antara lain wadah organisasi dan (4) rencana pelaksanaan.

Pertemuan tersebut di atas diikuti dengan : (1) lokakarya SKPG tingkat nasional untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan dukungan pelaksanaannya, (2) latihan orientasi bagi petugas pelaksana tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan sub desa (kekliangan atau dukuh), dan (3) pelaksanaan SIDI di daerah yang bersangkutan.

### Formulasi SIDI di Lombok Tengah dan Boyolali

#### *Dasar-dasar Pengembangan SIDI*

Usaha pengembangan SIDI di daerah-daerah sangat bergantung kepada dua pihak, yaitu pihak Pemda dan pihak Pusat. Khusus dalam kasus pemanduan ini yang disebut sebagai pihak Pusat adalah Puslitbang Gizi yang bekerjasama dengan Universitas Cornell dan Direktorat Gizi. Pihak Pemda memiliki kemauan, wewenang, aparat serta sarana pelaksa-

naan, sedangkan pihak Pusat mempersiapkan konsep SIDI yang dirumuskan atas dasar serangkaian penelitian di daerah pemanduan dan siap untuk mengalihkan kemampuan teknis pada pelaksana di daerah. Paduan antara keduanya merupakan modal dasar untuk pengembangan dan pelaksanaan SIDI di daerah.

Seperti diuraikan dalam Bab III, formulasi SIDI didasarkan atas :

1. Pengkajian Riwayat Krisis Pangan (RKP) yang hasilnya berupa informasi tentang lokasi, waktu, tingkat kerawanan krisis pangan yang pernah terjadi serta faktor-faktor penyebabnya.
2. Pengkajian Kalender Pertanian (KP), yang antara lain memberikan gambaran tentang komoditas pangan yang sangat mempengaruhi kehidupan sebagian besar masyarakat, jadwal dan besaran masing-masing proses kegiatan produksi pertanian mulai dari pengolahan tanah sampai pasca panen, waktu ketersediaan kesempatan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan pangan dan tingkat produksi berbagai komoditas.
3. Hasil kedua pengkajian dianalisis bersama-sama untuk mendapatkan indikator peramalan, waktu untuk melakukan peramalan dan pengamatan dan waktu untuk melakukan intervensi.
4. Indikator untuk memonitor persediaan dan konsumsi pangan masyarakat. Di kabupaten Lombok Tengah dan Boyolali digunakan indikator perubahan pola konsumsi pangan penduduk.
5. Organisasi yang ada untuk pelaksanaan SIDI, untuk meliputi kegiatan pengumpulan informasi, analisis, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk pelaksanaan intervensi.

#### *Peran Serta Pemda dan Aparatnya*

SIDI dikembangkan dengan maksud agar dapat digunakan oleh Pemda sebagai alat di dalam menangani masalah pangan dan gizi yang ada di daerahnya. Karena itu agar Pemda dan aparatnya mampu melaksanakan

SIDI dengan baik, Puslitbang Gizi dari semula senantiasa melibatkan aparat Pemda dalam setiap tahap kegiatan yang dilakukannya.

Keterlibatan Bupati/KDH dan aparatnya secara aktif dimulai sejak pelaksanaan penelitian untuk formulasi SIDI hingga selesai perumusannya, seperti penyediaan tenaga pengumpul data (*enumerator*) membantu kelancaran penelitian, dan memberikan sumbangan pikiran berupa tanggapan atau saran yang berkenaan dengan indikator-indikator hasil analisis yang dilakukan oleh Puslitbang Gizi dan yang berkenaan dengan organisasi. Di samping itu di dalam lokakarya atau pertemuan-pertemuan lainnya pejabat-pejabat kabupaten juga banyak memberikan saran berguna bagi pengembangan SIDI, seperti dalam hal penentuan lokasi pemanduan, waktu mulai pelaksanaan, jalur informasi yang baik, organisasi pelaksanaan, dan sebagainya. Dengan demikian peran serta aktif Kepala Daerah dan aparatnya sangat menentukan tingkat pemahaman mereka mengenai SIDI yang akhirnya mempengaruhi kelancaran pelaksanaannya.

#### *SIDI di Kabupaten Lombok Tengah dan Boyolali*

Pada bulan Nopember 1981 SIDI selesai dirumuskan atas dasar serangkaian penelitian di kabupaten Lombok Tengah. Awal bulan Desember 1981 Puslitbang Gizi mengundang Bupati Kepala Daerah Tingkat II kabupaten Lombok Tengah dan para pejabat tingkat II kabupaten Lombok Tengah dan beberapa pejabat tingkat propinsi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan SIDI, yaitu Bagian Kesra Kantor Pemda, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Awal bulan Januari 1982 diadakan Lokakarya SKPG Nasional di Bogor, untuk memantapkan SIDI yang telah dirumuskan oleh tim Puslitbang Gizi dan sudah didiskusikan dengan pihak Pemda kabupaten Lombok Tengah. Bulan Mei 1982 SIDI mulai diterapkan di kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan SIDI di kabupaten Lombok Tengah diawali dengan suatu rapat pleno Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Kabupaten. Maksudnya untuk memberi penjelasan tentang pengertian SIDI, tujuannya, or-

ganisasi dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam rapat tersebut para Camat juga diundang. Bulan Juli, Agustus dan September 1982 dilakukan latihan-latihan untuk tenaga pelaksana tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kecliangan. Latihan tenaga tingkat kabupaten dan kecamatan dilakukan oleh tim SKPG Puslitbang Gizi disertai anggota tim SKPG tingkat propinsi. Latihan untuk tenaga-tenaga pelaksana di desa dilakukan oleh tenaga pelaksana tingkat kabupaten dibantu oleh tenaga pelaksana kecamatan, didampingi oleh anggota tim SKPG Puslitbang Gizi Bogor.

Materi yang diberikan dalam latihan tenaga pelaksana tingkat kabupaten dan kecamatan terutama mengenai : (1) pengertian dan tujuan SKPG/SIDI, (2) mekanisme kerja dan organisasinya, (3) pengolahan dan analisis data, dan (4) jadwal kegiatan-kegiatan SIDI. Sedangkan pokok-pokok materi untuk tingkat desa dan kecliangan hampir sama dengan materi latihan untuk petugas kecamatan tetapi lebih diarahkan pada pengamatan situasi konsumsi pangan, cara mencatatnya dalam formulir laporan serta waktu-waktu pelaksanaannya. Karena tingkat pendidikan para Kepala Desa, petugas desa dan Kliang pada umumnya relatif rendah, materi yang diberikan disampaikan dengan cara sederhana dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas mereka.

Sejak bulan Mei 1982 hingga bulan Maret 1983 Puslitbang Gizi menempatkan empat orang anggota tim secara penuh di kabupaten Lombok Tengah, dengan tugas seperti dikemukakan dalam Bab III.

Langkah-langkah dan kegiatan dalam SIDI dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pertama adalah pengelompokan kecamatan-kecamatan dan desa-desa ke dalam 3 kategori yaitu rawan, setengah rawan, dan aman. Pengelompokan itu dilakukan berdasarkan data luas tanam padi sampai dengan akhir masa tanam (sampai dengan akhir Januari). Data tersebut disiapkan oleh anggota tim SKPG tingkat kabupaten yang ada di Dinas Pertanian. Analisis data, penarikan kesimpulan, dan

penentuan usulan alternatif kebijakan tindakan dilakukan oleh tim SKPG kabupaten.

- b. Kegiatan kedua adalah pengelompokan kecamatan-kecamatan dan desa-desa berdasarkan data luas panen padi sampai dengan akhir masa panen (sampai dengan akhir Juni). Hasil pengelompokan kedua merupakan kelanjutan dan pemantapan dengan hasil pengelompokan pertama.
- c. Kegiatan ketiga adalah pengelompokan kecamatan-kecamatan dan desa-desa berdasarkan data produksi beras per kapita per tahun. Hasil ini selanjutnya digunakan untuk memantapkan gambaran peramalan kedua mengenai situasi pangan dan gizi penduduk. Berdasar pengelompokan daerah dan desa-desa pada setiap waktu peramalan Penda akan dapat mengalokasikan perhatiannya kepada desa-desa dan kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kategori rawan dan setengah rawan.
- d. Kegiatan keempat adalah memonitor tingkat persediaan dan konsumsi pangan masyarakat dengan menggunakan indikator perubahan pola konsumsi pangan penduduk. Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Maret, dan melibatkan langsung Klianng klianng sebagai pengamat di tingkat masyarakat. Data perubahan pola konsumsi pangan penduduk dikumpulkan oleh Klianng, kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa. Selanjutnya di tingkat desa data dikompilasi dalam formulir yang sudah disediakan dan dilaporkan kepada Camat. Oleh petugas pelaksana SKPG tingkat kecamatan laporan tersebut dikompilasi dan diteruskan kepada Bagian Kesra Kantor Kabupaten. Di Bagian Kesra data tersebut diolah dan hasilnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan, Pertanian, Sosial, dan ke kecamatan-kecamatan.

Dalam hal SIDI memberikan isyarat bahwa suatu saat akan timbul masalah, maka pada saat yang tepat Penda akan memberikan intervensi secara bertahap. Dengan melakukan intervensi lebih dini, selalu dihindari untuk memberikan bantuan pangan dengan cuma-cuma. Pada da-

sarnya intervensi terdiri atas beberapa tingkatan : (a) intervensi berupa usaha dari masyarakat sendiri atau gotong royong, (b) jika gotong royong tidak timbul, masyarakat yang memerlukan bantuan dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan, (c) jika proyek-proyek pembangunan tidak cukup untuk menangani kasus yang timbul maka diturunkan proyek padat karya, (d) dalam keadaan daya beli masyarakat sudah menurun, biasanya proyek padat karya diikuti dengan Operasi Pasar oleh DOLOG atau pemberian pinjaman pangan dari dana yang disebut lumbung kemakmuran, dan (e) dalam keadaan terpaksa, anggota masyarakat diberi bantuan sosial berupa bantuan pangan atau jika perlu perawatan kesehatan.

Di dalam perjalanannya, SIDI di kabupaten Lombok Tengah dalam beberapa segi mengalami sedikit modifikasi. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan SIDI/SKPG di Lombok Tengah berdasar pengalaman-pengalaman di lapangan dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh pengelola di kabupaten. Modifikasi-modifikasi yang dilakukan antara lain dalam segi-segi :

a. Organisasi.

Kini tim SKPG tingkat kabupaten dilengkapi dengan unsur dari Bappeda dan PKK. Ini dirasa perlu karena Bappeda merupakan badan perencana pembangunan, sehingga dengan masuknya Bappeda ke dalam tim SKPG maka usaha pencegahan atau penanggulangan masalah rawan pangan dapat dikaitkan dengan rencana daerah. Di samping itu keikutsertaan PKK dalam tim SKPG diharapkan banyak membantu di dalam arus pelaporan dari tingkat desa dan berbagai kegiatan intervensi gizi. Di waktu-waktu mendatang PKK diharapkan akan aktif di dalam pengumpulan data, misalnya data hasil penimbangan anak Balita.

b. Laporan.

Menyangkut hal ini ada beberapa modifikasi yang dilakukan :

### 1. Isi atau informasi yang harus dilaporkan.

Semula untuk pengamatan situasi konsumsi pangan penduduk dari tingkat desa hanya dilaporkan perubahan pola konsumsi bahan pangan pokok. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik, kini ditambahkan informasi kualitatif yang memberikan gambaran perubahan konsumsi kuantitatif secara sederhana.

### 2. Frekuensi Pelaporan.

Pelaporan data perubahan pola konsumsi pangan penduduk dilaporkan sebulan sekali. Menurut pertimbangan Kepala Daerah data tersebut dilaporkan sebulan dua kali sesuai dengan keadaan. Bahkan dalam keadaan situasi yang memburuk direncanakan agar pelaporan dapat dilakukan empat kali dalam sebulan.

### 3. Jalur Pelaporan.

Data perubahan pola konsumsi pangan penduduk yang berasal dari tingkat kecliangan dikirim ke tingkat desa. Setelah dikompilasi diteruskan ke tingkat kecamatan dan kabupaten, data yang sudah dikompilasi dikirim ke tingkat kabupaten dengan tembusan ke Puskesmas setempat. Sudah ditetapkan bahwa laporan akan di tembuskan juga ke Pembina PKK tingkat kabupaten. Agar usaha penanggulangan masalah pangan dan gizi lebih efektif, kini hasil analisis oleh tim SKPG kabupaten dikirim ke kecamatan-kecamatan sebagai umpan balik dan juga ke instansi-instansi tingkat kabupaten seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pertanian.

### c. *Monitoring.*

Setelah SIDI digunakan sekian lama dirasakan bahwa batasan yang digunakan untuk melakukan klasifikasi kecamatan-kecamatan dan desa-desa tidak selalu tepat. Hal itu dirasakan setelah menghubungkan hasil klasifikasi dengan laporan perubahan pola konsumsi pangan penduduk. Misalnya desa yang diklasifikasikan sebagai desa aman ternyata pola konsumsi pangan penduduknya cenderung menurun agak cepat, sedangkan desa yang diklasifikasikan sebagai desa ti-

dak aman ternyata pola konsumsi pangan penduduk tidak terlalu menurun seperti yang dikuatirkan. Berhubungan dengan hal itu tim SKPG kabupaten Lombok Tengah mencoba memperbaiki metoda klasifikasi itu dengan memasukkan faktor "kesempatan kerja" (dengan cara yang sangat sederhana).

d. Intervensi.

Dalam hal intervensi ini Pemda kabupaten Lombok Tengah telah membagi intervensi ke dalam tiga kelompok, yaitu : (1) intervensi yang bersifat jangka panjang, (2) intervensi yang bersifat jangka pendek, (3) intervensi yang bersifat kuratif. Lebih jauh telah ditentukan instansi-instansi atau badan-badan yang mendapat tugas untuk melaksanakan masing-masing kelompok intervensi tersebut. Proses pengembangan SIDI telah merangsang Pemda setempat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan intervensi, seperti menggerakkan pengumpulan zakat (zakat harta) yang kemudian sebagian hasilnya diarahkan untuk bantuan bagi anggota masyarakat yang memerlukan sebagai salah satu kegiatan intervensi.

Walaupun nampaknya usaha pencegahan atau penanggulangan masalah pangan dan gizi di kabupaten Lombok Tengah berjalan dengan baik, namun dalam melaksanakan usaha tersebut dihadapi berbagai hambatan.

Hambatan-hambatan yang dirasakan antara lain :

- a. Tenaga pelaksana SKPG terutama di tingkat desa dan kekliangan. Ini terutama menyangkut tingkat pendidikan Kliang-kliang yang rendah dan bahkan ada yang buta huruf. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi kualitas data yang dilaporkan.
- b. Beberapa kekliangan letaknya jauh terpencil, kecil dan menyebar, dan sarana transportasi belum sampai ke sana. Hal ini mempengaruhi kelancaran arus pelaporan dan pengawasan.
- c. Belum diketahui berapa luas "tanah absentee" (tanah yang dimiliki oleh orang dari luar desa). Informasi ini sangat diperlukan untuk membantu mengambil kesimpulan dari hasil analisis data pertanian yang yang dilaporkan.

### *SIDI di Kabupaten Boyolali*

SIDI di kabupaten Boyolali mulai dilaksanakan pada bulan September 1982. Penerapan SIDI di kabupaten Boyolali dimaksudkan untuk melihat apakah SIDI yang dirumuskan atas dasar penelitian di kabupaten Lombok Tengah juga dapat digunakan di kabupaten lain. Karena tujuan tersebut, maka tahap-tahap yang ditempuh di kabupaten Boyolali, mulai dari perumusan sistem sampai pelaksanaannya, mengikuti tahap-tahap yang ditempuh di kabupaten Lombok Tengah. Di kabupaten Boyolali juga ditempatkan empat orang petugas Puslitbang Gizi, dengan tugas yang sama seperti di Lombok Tengah sejak bulan September 1982 sampai dengan Maret 1983. Di samping itu ditempatkan pula seorang staf Puslitbang Gizi di tingkat propinsi.

Hasil pemanduan menunjukkan bahwa SIDI sebagai suatu sistem dapat diterapkan di Boyolali. Walaupun demikian diperlukan penyesuaian dalam hal indikator yang digunakan untuk klasifikasi III. Kalau di Lombok Tengah digunakan produksi beras per kapita per tahun, di Boyolali digunakan produksi setara beras per kapita per tahun.

Peramalan I atau klasifikasi I di kabupaten Boyolali juga dilakukan berdasarkan data Luas Tanam Padi sampai dengan akhir masa tanam. Tetapi karena keadaan alam dan pola pertanian di Boyolali dan Lombok Tengah agak berbeda, maka peramalan I di Boyolali dilakukan pada bulan April. Selanjutnya peramalan II dilakukan pada bulan Juni, dan peramalan III dilakukan pada bulan Juli. Pengamatan perubahan pola konsumsi pangan penduduk juga dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Maret.

### **Reorganisasi BPGD Propinsi dan Kabupaten dan Integrasi SIDI ke dalam BPGD**

Salah satu prinsip dalam pengembangan SKPG adalah menggunakan wadah organisasi yang sudah ada, yakni organisasi yang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi. Agar dapat melaksanakan SIDI dengan

baik, BPGD yang pernah dibentuk di berbagai tingkat administrasi perlu diaktifkan kembali dan dilakukan reorganisasi sehingga dapat menampung kegiatan SIDI. Di Propinsi NTB kegiatan ini ditandai dengan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 10/444/2454/008 tahun 1983 tentang reorganisasi BPGD sedangkan di propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 444/180/1980 tahun 1980.

Pembaharuan BPGD di daerah merupakan langkah formal yang perlu dilakukan agar kegiatan SKPG dapat dimulai. Pembentukan BPGD secara resmi, walaupun dengan Surat Keputusan Gubernur belumlah merupakan jaminan kelancaran pelaksanaan SKPG. Beberapa hal yang turut menentukan pendayagunaan fungsi BPGD sebagai badan koordinasi dalam bidang perbaikan gizi, antara lain :

1. BPGD merupakan organisasi fungsional, bukan struktural, yang fungsinya bersifat koordinatif. Oleh karena itu diperlukan keterikatan (kesepakatan) dari semua anggota, yang terdiri dari kepala kepala instansi yang tergabung dalam BPGD termasuk Pemerintah Daerah. Keterlibatan Kepala Daerah (Gubernur di Propinsi dan Bupati di Kabupaten) secara langsung dalam mengelola BPGD merupakan faktor yang sangat penting.
2. Ketua Dewan Harian dalam pengelolaan BPGD sehari-hari, pada umumnya adalah Kepala Biro Kesra di propinsi dan kepala Bagian Kesra di kabupaten. Pandangan, perhatian dan keterlibatan pejabat ini dalam penanganan masalah gizi di daerahnya sangat erat hubungannya dengan keaktifan BPGD setempat. Di samping itu di banyak daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten, wakil ketua dewan harian ialah Kepala Dinas Kesehatan. Hubungan kerjasama yang baik antara kedua pejabat ini sangat besar peranannya terhadap keaktifan BPGD. Mutasi yang sering dilakukan pada pejabat-pejabat bersangkutan dapat merupakan hambatan yang umumnya terjadi di banyak daerah.
3. Semenjak BPGD dibentuk pertama kali, masalah yang sampai dewasa ini masih selalu dihadapi ialah tidak ada tenaga penuh (*full*

*timer*) pada sekretariat BPGD. Sekretariat BPGD merupakan motor penggerak bagi BPGD, karena aktifitas BPGD sangat bergantung kepada kelancaran tugas kesekretariatan BPGD. Ini hanya mungkin jika sekretaris BPGD mempunyai tenaga staf yang bertugas secara penuh untuk kegiatan kesekretariatan BPGD. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal ini ialah dengan menempatkan kesekretariatan BPGD pada unit yang langsung dibawahahi oleh sekretaris BPGD. Fungsi sekretaris BPGD biasanya dipegang oleh salah seorang staf Biro/Bagian Kesra atau kepala unit gizi Dinas Kesehatan. Menempatkan tugas kesekretariatan BPGD pada unit kerja struktural yang dibawahahi oleh sekretaris BPGD merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah tenaga *full timer*. Masalah ini justru menjadi sangat perlu mendapat perhatian dalam penanganan kegiatan SKPG, mengingat tugas-tugas sehari-hari yang perlu dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan dan analisisnya dan tugas-tugas supervisi ke tingkat di bawahnya.

#### 4. Program BPGD

Salah satu hal yang menjadi hambatan keaktifan BPGD ialah karena tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh BPGD belum diatur secara jelas. Dikatakan bahwa BPGD berfungsi koordinatif terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan gizi masyarakat. Namun kelemahan yang tampak ialah bahwa belum ada keseragaman pengertian tentang ruang lingkup usaha perbaikan gizi di daerah yang memerlukan koordinasi. Berbagai kegiatan sektoral yang bersifat nasional, walaupun seharusnya merupakan komponen usaha perbaikan gizi di daerah, sering tidak termasuk dalam kegiatan yang harus dicakup oleh BPGD. Sebagai akibatnya, sering tidak jelas batas-batas tanggung jawab wewenang dan tugas instansi yang bersangkutan sebagai anggota BPGD. Pada umumnya belum ada suatu program gizi yang mencakup keseluruhan kegiatan yang ada di daerah yang bersangkutan.

#### 5. Pembinaan BPGD dari tingkat nasional

Sampai dewasa ini belum ada suatu ketegasan tentang penanggung jawab pembinaan BPGD di tingkat nasional. Secara organisasi BPGD

merupakan aparat koordinasi kegiatan usaha gizi dari pemerintah daerah. Namun untuk pembinaan teknis seharusnya mendapat bimbingan dari tingkat Pusat. Bimbingan teknis untuk menjaga kelestarian kegiatan BPGD dari tingkat pusat boleh dikatakan tidak pernah ada. Yang ada ialah pembinaan kegiatan gizi yang sifatnya sektoral. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang pembinaan BPGD ini merupakan hal penting untuk usaha pengembangan SKPG di masa-masa mendatang, terutama kalau SKPG diluaskan ke daerah-daerah baru.

#### 6. Kejelasan tugas-tugas berbagai instansi dalam SKPG

Dengan pengintegrasian kegiatan SKPG dalam BPGD, perincian tugas-tugas yang berkaitan dengan SKPG baik yang menyangkut sub sistem informasi maupun sub sistem intervensi perlu disepakati antara berbagai instansi dan organisasi yang tergabung dalam BPGD. Kesepakatan tentang batas-batas yang menjadi tugas sekretariat dan instansi-instansi yang berkaitan (misalnya dalam sub sistem informasi) harus ada agar kegiatan-kegiatan dalam SKPG dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

#### 7. Unit SKPG di BPGD

Dalam tahap pengembangan SKPG dewasa ini penanganan di BPGD, khususnya yang berkaitan dengan sub sistem informasi (pengumpulan data, pengolahan dan analisis serta pelaporan) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari wakil-wakil Dinas Kesehatan, Pertanian, (di daerah tertentu juga KS) dan dari Biro atau Bagian Kesra kantor Pemda yang biasanya menjadi koordinator. Dalam jangka panjang, tim seperti ini hendaknya merupakan suatu unit tetap di bawah sekretaris BPGD, atau staf tetap di Biro/Bagian Kesra kantor Pemda. Usaha ke arah ini perlu mendapat perhatian BPGD setempat. Usaha latihan terhadap tenaga-tenaga ini akan sangat membantu kelestarian SKPG di masa yang akan datang.

#### 8. Anggaran BPGD

Terdapat perbedaan-perbedaan dalam penyediaan anggaran kegiatan BPGD di berbagai daerah. Pada umumnya, karena BPGD mempunyai tu-

gas koordinasi, oleh Pemda hanya disediakan anggaran rutin untuk keperluan administrasi yang jumlahnya sangat kecil. Jarang terdapat BPGD yang mendapatkan anggaran untuk kegiatan program perbaikan gizi, baik dari anggaran rutin maupun anggaran Pembangunan Daerah. Dengan keadaan yang demikian, jika SKPG dilaksanakan oleh BPGD, persoalan penyediaan anggaran untuk kegiatan rutin oleh Pemda perlu diberikan perhatian. Dengan adanya SKPG, terutama pada masa-masa permulaan dan dalam situasi pangan dan gizi memerlukan perhatian khusus di daerah yang bersangkutan, diperlukan kegiatan-kegiatan supervisi, pengamatan lapangan dan lain-lain. Semua ini memerlukan biaya. Kalau dalam masa-masa permulaan SKPG merupakan proyek yang mendapat bantuan dari tingkat pusat, maka dalam jangka panjang penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah sendiri merupakan kunci bagi keberhasilan dan kelestarian kegiatan ini. Perlu diberikan tekanan dari semula bahwa kegiatan ini hendaknya pada akhirnya merupakan bagian integral dari tugas dan tanggung jawab daerah.

#### *Pembentukan Tim SKPG*

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan SIDI di tingkat propinsi dan kabupaten dibentuk tim SKPG di masing-masing tingkat. Tim terdiri dari sekurang-kurangnya tiga unsur utama, yaitu Pemda, Instansi Kesehatan, dan Instansi Pertanian. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk menggiatkan kembali BPGD, agar dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian tim SKPG yang sudah dibentuk itu diintegrasikan ke dalam BPGD.

#### *Peranan dan Tanggung Jawab Tim SKPG*

Setelah masa pemanduan selesai pengelolaan SIDI selanjutnya dialihkan kepada Pemda. Tanggung jawab atas kelancaran dan kelestarian pelaksanaan selanjutnya berada pada Pemda baik tingkat propinsi

maupun kabupaten.

Dalam garis besar tanggung jawab Pemda tingkat propinsi ialah :

1. Memperlancar dan melestarikan SIDI yang sudah dilaksanakan di kabupaten pemanduan.
2. Meluaskan SIDI ke kabupaten-kabupaten baru yang memerlukannya.
3. Mengembangkan SIDI ke arah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang ruang lingkungannya lebih luas.

Tugas-tugas yang perlu dilakukan sehubungan dengan hal di atas antara lain :

1. Melakukan supervisi ke tingkat kabupaten atau ke tingkat yang lebih bawah.
2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SIDI di tingkat kabupaten, seperti : (a) membantu memecahkan masalah yang timbul dalam hal organisasi pelaksanaan, (b) memberikan bimbingan teknis, (c) membantu pengadaan sarana untuk intervensi, dan (d) memberi dukungan administrasi kepada tingkat kabupaten, misalnya memberi dukungan dana.
3. Bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam upaya pelestarian, pengembangan dan perluasan SIDI.

Sejalan dengan tanggung jawab Pemda tingkat propinsi, maka tanggung jawab Pemda tingkat kabupaten ialah :

1. Mengelola, memperlancar dan melestarikan SIDI yang sudah berjalan.
2. Meluaskan pelaksanaan SIDI ke kecamatan-kecamatan baru yang memerlukan SIDI.
3. Mengirimkan informasi yang berguna bagi Pemda tingkat propinsi yang berhubungan dengan kegiatan SIDI/SKPG.

*Peranan Pemda dan BPGD dalam Penanggulangan Masalah Krisis Pangan*

BPGD berfungsi sebagai badan koordinasi lintas sektoral yang berkewajiban memberi masukan-masukan (informasi) yang berkaitan de-

ngan usaha perbaikan gizi masyarakat kepada penentu kebijakan (Pemda), sekaligus mengkoordinasikan pelaksanaan program yang ditetapkan oleh para penentu kebijakan.

Pada tahap perencanaan BPGD bekerjasama dengan Bappeda untuk merencanakan persiapan sarana intervensi. Dalam keadaan BPGD belum berfungsi dengan baik, maka fungsi tersebut dapat dilakukan oleh tim SKPG yang sudah dibentuk. Berkaitan dengan monitoring situasi pangan dan gizi masyarakat, BPGD berkewajiban memberikan laporan kepada penentu kebijakan tentang hasil-hasil monitoring, secara teratur dan tepat waktu. Berdasarkan informasi yang diberikan itu para penentu kebijakan akan mengambil keputusan mengenai macam tindakan yang harus dilakukan. BPGD bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian intervensi yang telah ditetapkan.

Dalam hal menghimpun informasi yang berkaitan dengan situasi pangan dan gizi masyarakat, instansi yang banyak terlibat ialah Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan aparat Pemda. Dalam hal intervensi berbagai instansi terlibat langsung bergantung kepada macam intervensi yang dilakukan antara lain Pertanian, Sosial, Dolog, Bina Guna, Pemda, dan lain-lain.

#### Latihan Orientasi dan Teknis untuk Pelaksanaan SIDI

Di tingkat kabupaten, dalam rangka latihan orientasi, diadakan lokakarya mini. Lokakarya tersebut dihadiri oleh instansi-instansi anggota BPGD tingkat kabupaten dan para Camat. Selain Camat, dari masing-masing kecamatan hadir pula wakil-wakil dari instansi Pertanian, Kesehatan, dan Kesra. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian, tujuan, dan kegunaan SKPG, tugas dan tanggung jawab pelaksana SKPG, di masing-masing tingkat, serta rencana pelaksanaan SIDI. Lokakarya diselenggarakan selama satu hari.

Lokakarya tersebut kemudian langsung diikuti dengan latihan teknis, khusus bagi tenaga pelaksana SIDI tingkat kabupaten dan kecamatan. Latihan teknis itu diarahkan kepada cara-cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data indikator yang digunakan di dalam SIDI serta mekanisme kerja SIDI. Latihan ini dimaksudkan juga untuk memberi bahan-bahan yang berguna di dalam melakukan latihan tenaga pelaksana tingkat desa dan sub desa. Lokakarya diselenggarakan selama tiga hari.

Setelah latihan untuk petugas pelaksana SKPG tingkat kabupaten dan kecamatan selesai, kemudian dilakukan latihan untuk petugas pelaksana SKPG tingkat desa dan sub desa (kekeluargaan atau dukuh). Latihan diselenggarakan selama dua hari, dan diberikan oleh petugas pelaksana tingkat kabupaten bersama-sama dengan petugas tingkat kecamatan dan dibantu oleh tenaga *full timer* yang ditugaskan oleh Puslitbang Gizi di sana.

Materi latihan antara lain tentang pengertian, tujuan, dan kegunaan SIDI, tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, cara-cara pengisian formulir, dan ketentuan-ketentuan pelaporan. Tindak lanjut dari latihan tersebut adalah pelaksanaan SIDI di kabupaten yang bersangkutan. Sementara SIDI berjalan, tenaga *full timer* senantiasa mendatangi para Kepala Desa dan Klianng untuk memberi bimbingan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan SIDI. Hal ini dianggap penting mengingat bahwa dengan latihan selama dua hari saja belum dapat membuat para Kepala Desa dan Klianng memahami materi yang diberikan di dalam latihan.

### Peranan Tim Peneliti SKPG

Dalam tahap penelitian tugas utama tim peneliti SKPG adalah memformulasikan SIDI. Pada tahap selanjutnya tim peneliti SKPG dari Puslitbang Gizi Bogor yang bekerjasama dengan Universitas Cornell, Direktorat Gizi, dan IPB (sejak tahun 1982) memegang peranan yang

lebih kecil, terbatas pada kegiatan-kegiatan : (1) memberikan masukan-masukan teknis, (2) membantu memecahkan masalah yang dijumpai di dalam pelaksanaan SIDI di daerah, (3) membantu mengidentifikasi masalah, dan (4) melakukan penelitian-penelitian operasional yang berguna untuk menyempurnakan SIDI yang sudah diformulasikan dan diterapkan di daerah. Kegiatan-kegiatan operasional seperti pelaporan data/informasi, pengolahan dan analisis data, pemberian intervensi, dan sebagainya sepenuhnya dilakukan oleh Pemda beserta aparatnya.

### Pendekatan untuk Formulasi dan Pelaksanaan SIDI di Daerah Baru

Setelah kegiatan pemanduan SIDI selesai dan dievaluasi, kegiatan selanjutnya adalah perluasan SIDI ke daerah-daerah baru. Perluasan SIDI ke propinsi-propinsi baru merupakan tanggung jawab pengelola SKPG tingkat pusat, sedangkan perluasannya ke kabupaten-kabupaten baru merupakan tanggung jawab Pemda tingkat Propinsi.

Puslitbang Gizi, sesuai dengan rencananya, meluaskan pelaksanaan SIDI di propinsi Bali; sedangkan Pemda NTB dan Jawa Tengah (dengan bantuan Direktorat Gizi) sudah memutuskan untuk mengembangkan SIDI ke kabupaten lain di daerahnya. Pemda NTB mengembangkannya ke kabupaten Lombok Timur (1982) dan Pemda Jawa Tengah mengembangkannya ke kabupaten Pekalongan. Pada tahun 1983-1984 Pemda NTB merencanakan mengembangkan SIDI di Lombok Barat dan direncanakan juga ke kabupaten-kabupaten lainnya. Di samping itu dengan bantuan Direktorat Gizi pula direncanakan pengembangan SKPG/SIDI ke propinsi-propinsi lain, misalnya ke Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan di atas, Puslitbang Gizi telah menyiapkan buku pedoman perumusan SIDI. Karena buku pedoman nantinya akan digunakan untuk berbagai daerah di Indonesia, maka sebelum disebarluaskan buku tersebut perlu diuji coba di suatu tempat. Dalam hal ini Puslitbang Gizi telah menetapkan bahwa uji coba buku pedoman

itu dilakukan di propinsi Bali. Selanjutnya buku pedoman disempurnakan atas dasar pengalaman uji coba di sana.

Pendekatan yang dilakukan untuk pelaksanaan SIDI di Bali agak berbeda dengan pendekatan yang dilakukan di NTB dan Jawa Tengah. Di Bali hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan SIDI, mulai dari formulasi sistem sampai pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh tim SKPG setempat. Untuk itu Puslitbang Gizi memberi latihan pengarahan kepada tim SKPG tingkat propinsi dengan materi pokok adalah isi buku pedoman perumusan SIDI. Selanjutnya Puslitbang Gizi bertindak sebagai "konsultan", yang sewaktu-waktu bersedia membantu bila diperlukan. Dengan cara pendekatan ini akan dapat dilihat apakah buku pedoman tersebut sudah cukup baik. Satu hal yang patut diketahui adalah bahwa tim SKPG tingkat propinsi di Bali terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Kanwil Pertanian, Kanwil dan Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi setempat.

Tersedianya buku pedoman perumusan SIDI merupakan modal di dalam pendekatan kepada Pemda dan Universitas setempat untuk pengembangan SIDI di daerah baru. Hubungan kerjasama antara Pemda dan perguruan tinggi setempat dirasakan sangat perlu karena di dalam menjalankan SIDI, dalam hal-hal tertentu, Pemerintah Daerah tentu akan memerlukan bantuannya. Misalnya di dalam mengatasi masalah yang bersifat teknis dan memerlukan pemecahan yang bersifat teknis pula. Karena itu di dalam usaha memperluas SKPG/SIDI ke daerah lain haruslah dilakukan pendekatan kepada Pemda dan sekaligus kepada perguruan tinggi setempat, agar kemampuan teknis perguruan tinggi setempat meningkat dan hubungan kerjasama antara Pemda dan perguruan tinggi dapat berkembang terus.